

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

KEBIJAKAN MAO ZEDONG DALAM MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN POLITIK PEMERINTAHAN PARTAI KOMUNIS CINA

Oleh

Daniel Tobu Martono

Penulisan skripsi ini bertujuan menerangkan kebijakan Mao Zedong dalam mempertahankan kekuasaan politik pemerintahan Partai Komunis Cina 1956-1966, dalam sudut pandang sejarah politik. Dalam pembahasan ini terlebih dahulu dibahas: 1. Faktor-faktor yang mendorong Mao mengeluarkan kebijakan politiknya, 2. Munculnya kebijakan Mao Zedong yang digunakan Mao sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan semangat revolusi, 3. Dampak dari munculnya kebijakan Mao Zedong bagi situasi dalam negeri Cina dan hubungan internasional Cina.

Metode yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah. Langkah-langkah dalam penulisan metode sejarah adalah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan sejarah politik.

Hasil dari penulisan skripsi ini dapat diketahui bahwa persoalan munculnya kebijakan Mao dalam politik pemerintahan PKC mengenai penentuan buruh dan petani sebagai saka guru revolusi, yang kemudian berimplikasi pada kontradiksi antara kota dan desa, baik sebagai basis revolusi maupun pembangunan sosial ekonomi. Karena dipengaruhi oleh pengalaman revolusi yang dialami oleh kedua pemimpin puncak PKC Mao dan Liu Shao Chi pada masa perang pembebasan melawan Guomindang. Dimana Mao bersama PKC melakukan siasat perang gerilya di pedesaan dengan mengorganisir para petani yang merupakan mayoritas penduduk Cina. Sedangkan Liu Shao Chi banyak terlibat dalam melakukan gerakan komunis bawah tanah di kota-kota dengan melakukan pemogokan buruh-buruh pabrik perkotaan. Faktor eksternal yang mempengaruhi keluarnya kebijakan Mao adalah, konflik Cina-Uni Soviet, konflik Cina-Amerika Serikat, dan konflik Cina-Jepang. Munculnya kebijakan Mao seperti, Kampanye Seratus Bunga, Lompatan Jauh ke Depan, dan Revolusi Kebudayaan. Mengakibatkan roda pemerintahan RRC tidak berjalan dengan semestinya dan menimbulkan banyak korban. Namun setelah meredanya Revolusi Kebudayaan hubungan luar negeri RRC dengan dunia luar mulai terjalin, khususnya hubungan Cina dengan Amerika Serikat, yang diwarnai kunjungan Presiden Nixon ke Cina tahun 1972. Di tahun 1971 Cina juga telah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB untuk menduduki kursi permanen yang mengakibatkan Taiwan meninggalkan PBB.

ABSTRACT

**THE POLICY OF MAO ZEDONG IN MAINTAINING
THE GOVERNMENT POLITIC AUTHORITY OF
CHINA COMMUNIST PARTY**

**By
Daniel Tobu Martono**

The purpose of the thesis was to describe the policy of Mao Zedong in maintaining the government political authority of China Communist Party 1956-1966 base on politic historical perspective. Items on this thesis are; 1. Factors that make Mao established his political policy, 2. The emergence of Mao Zedong policy which is used to maintain authority and spirit of revolution, 3. The impact of Mao Zedong's policy toward domestic situation and international relationship.

The method of the thesis was historical method. Its methods are heuristics, data processing, interpretation, and historiografi. The approach which is used in this thesis was politic historical approach.

The result of the thesis was the emergence of Mao's policy in political government of PKC concerning labour and farmer as a foundation of revolution movement, then this implicates to the contradiction among town and village as revolution base and social economic development triggered by revolution of the leadhership of PKC Mao and Liu Shao Chi in the warfare against Guomindang. In that time, Mao and PKC did the guerilla tactics war in rural by organizing farmer which is majority society in China. While Liu Shao Chi involve in conducting underground communist movement in towns by employess strike. Eksternal factors that influence Mao's policy are conflict of China-Soviet Union, China-US, and China-Japan. The emergence of Mao's policy such as A Hundred Flowers Campaign, Great Leap Forward, and Great Proletarian Cultural Revolution cause the rule way of RRC government do not work well and make many victims. However, after Great Proletarian Cultural Revolution, interrelationship of RRC become better especially with US. It is proved with the invitation President Nixon in China in 1972. In 1971 China become security council member of UN which cause Taiwan resign from UN's membership.